



*Rudy C Tarumingkeng: Surplus Perdagangan, tetapi Mengapa Tekanan
Ekonomi Domestik Masih Terasa*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

1 April 2026

SURPLUS PERDAGANGAN, TETAPI MENGAPA TEKANAN EKONOMI DOMESTIK MASIH TERASA

Abstrak

Makalah ini membahas paradoks ekonomi Indonesia pada awal 2026: neraca perdagangan tetap mencatat surplus, tetapi tekanan ekonomi domestik masih dirasakan oleh rumah tangga dan pelaku usaha. Data resmi menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia Januari 2026 surplus sekitar **US\$0,95 miliar**, dan untuk periode Januari–Februari 2026 surplus mencapai **US\$2,23 miliar**, terutama ditopang oleh surplus nonmigas, sementara sektor migas tetap defisit. Pada saat yang sama, ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh **5,11 persen**, ekspor barang dan jasa menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi, keyakinan konsumen Februari 2026 tetap optimistis, dan penjualan eceran diperkirakan meningkat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Namun, di balik kinerja makro tersebut, tekanan ekonomi domestik tetap terasa karena inflasi tahunan sempat naik menjadi **4,76 persen** pada Februari 2026 sebelum turun ke **3,48 persen** pada Maret 2026, rata-rata upah buruh pada November 2025 baru sekitar **Rp3,33 juta**, dan laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia masih kurang menghasilkan **good jobs**, dengan porsi pekerjaan kelas menengah turun dari **14 persen pada 2019 menjadi 8,4 persen pada 2023**. Makalah ini berargumen

bahwa surplus perdagangan tidak otomatis menjadi kenyamanan ekonomi domestik karena terdapat beberapa hambatan transmisi: surplus lebih banyak hidup pada level agregat dan terkonsentrasi pada sektor atau komoditas tertentu; defisit migas tetap membebani biaya ekonomi; kualitas pekerjaan dan upah riil belum cukup kuat; biaya hidup dan inflasi pada kebutuhan pokok tetap menekan; serta distribusi manfaat pertumbuhan masih belum merata antarwilayah dan antarkelompok sosial. Dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data resmi terbaru, makalah ini menyimpulkan bahwa surplus perdagangan penting sebagai bantalan eksternal, tetapi kesejahteraan domestik akan tetap tertekan bila surplus tersebut tidak diterjemahkan menjadi produktivitas, lapangan kerja berkualitas, biaya hidup yang lebih terkendali, dan perluasan kelas menengah yang lebih nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: *surplus perdagangan, tekanan domestik, inflasi, daya beli, pasar kerja, ketimpangan, Indonesia 2026*

Surplus Perdagangan, tetapi Mengapa Tekanan Ekonomi Domestik Masih Terasa?

Pendahuluan

Dalam banyak diskusi ekonomi, surplus perdagangan sering dipersepsikan sebagai tanda kesehatan ekonomi nasional. Logikanya sederhana: bila ekspor lebih besar daripada impor, maka negara memperoleh tambahan devisa, posisi eksternal lebih kuat, dan ketahanan ekonomi meningkat. Dalam batas tertentu, pandangan ini benar. Indonesia pada awal 2026 memang masih menikmati surplus perdagangan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada Januari 2026 neraca perdagangan surplus **US\$0,95 miliar**, sedangkan pada Januari–Februari 2026 surplus kumulatif

mencapai **US\$2,23 miliar**. Dari sudut makroekonomi, data ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memasuki 2026 dengan tekanan eksternal yang akut. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Akan tetapi, pengalaman ekonomi masyarakat tidak selalu mengikuti logika agregat tersebut. Bagi rumah tangga, kesejahteraan tidak diukur dari besarnya surplus perdagangan, melainkan dari pertanyaan yang jauh lebih konkret: apakah pendapatan cukup untuk membayar harga beras, telur, cabai, listrik, transportasi, sewa rumah, biaya sekolah, dan cicilan; apakah usaha kecil masih memiliki margin; dan apakah pekerjaan yang tersedia memungkinkan mobilitas sosial yang lebih baik. Di sinilah muncul paradoks penting: ekonomi bisa mencatat surplus perdagangan, pertumbuhan tetap terjaga, dan sentimen konsumen masih relatif baik, tetapi tekanan domestik tetap terasa di pasar, rumah tangga, dan sektor usaha kecil. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Paradoks ini sangat relevan bagi Indonesia pada awal 2026. Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh **5,11 persen**, lebih tinggi dari 2024, dan dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi, yakni **7,03 persen**. Di sisi permintaan domestik, Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen berada pada level optimistis **125,2**, sementara Indeks Penjualan Riil Februari 2026 diperkirakan tumbuh **6,9 persen** secara tahunan. Dengan demikian, dari sudut makro, Indonesia tampak cukup resilien. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, berbagai indikator lain menunjukkan bahwa tekanan domestik belum hilang. Inflasi tahunan naik menjadi **4,76 persen** pada Februari 2026 sebelum turun ke **3,48 persen** pada Maret 2026. Rata-rata upah buruh pada November 2025 tercatat sekitar **Rp3,33 juta**. Tingkat kemiskinan memang turun menjadi **8,25 persen**, dan gini ratio membaik ke **0,363**, tetapi perdesaan masih mencatat tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada perkotaan, sementara ketimpangan di kota masih relatif lebar. Di sisi pasar kerja, Bank Dunia menilai Indonesia masih kekurangan **good job**

opportunities, dan pertumbuhan kelas menengah pekerjaan justru melemah. Artinya, surplus perdagangan hidup berdampingan dengan kerentanan rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berangkat dari pertanyaan: **mengapa surplus perdagangan belum otomatis mengurangi tekanan ekonomi domestik di Indonesia?**

Argumen utama makalah ini adalah bahwa surplus perdagangan memang memperkuat neraca eksternal, tetapi tidak serta-merta menjadi kesejahteraan domestik karena terdapat hambatan transmisi yang bersifat struktural. Hambatan itu meliputi konsentrasi surplus pada sektor tertentu, defisit migas yang tetap besar, lemahnya kualitas pekerjaan, pertumbuhan upah riil yang terbatas, inflasi kebutuhan pokok, serta distribusi manfaat pertumbuhan yang tidak merata. Dengan kata lain, surplus perdagangan adalah kondisi yang perlu, tetapi belum cukup, untuk menjamin kenyamanan ekonomi domestik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Surplus perdagangan sebagai indikator makro: arti dan keterbatasannya

Secara ekonomi, surplus perdagangan berarti nilai ekspor barang lebih besar daripada nilai impor barang. Kondisi ini biasanya membantu stabilitas kurs, memperkuat cadangan devisa, dan memberi ruang lebih baik bagi neraca pembayaran. Dalam konteks Indonesia, surplus Januari 2026 sebesar **US\$0,95 miliar** dan surplus kumulatif Januari–Februari 2026 sebesar **US\$2,23 miliar** jelas merupakan kabar baik. BPS juga menegaskan bahwa surplus tersebut ditopang terutama oleh surplus nonmigas, sedangkan migas masih mencatat defisit. Struktur ini penting karena memperlihatkan bahwa daya tahan eksternal Indonesia tetap ada, tetapi bertumpu secara kuat pada sektor nonmigas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi pertumbuhan nasional, hubungan ini tampak cukup jelas. BPS mencatat bahwa ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh **5,11 persen**, dan komponen ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi dibanding komponen pengeluaran lain. Artinya, kinerja ekspor memang menjadi salah

satu mesin yang menopang pertumbuhan. Dalam pembacaan makro, situasi ini positif karena menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan konsumsi domestik, tetapi juga masih memiliki dukungan dari sektor eksternal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Akan tetapi, surplus perdagangan memiliki keterbatasan sebagai indikator kesejahteraan domestik. Pertama, ia adalah angka agregat nasional. Ia tidak otomatis menunjukkan siapa yang menikmati manfaat surplus tersebut. Kedua, surplus perdagangan tidak memberi tahu apakah nilai tambah yang tercipta menyebar luas ke tenaga kerja domestik atau hanya terpusat pada sektor, wilayah, dan pelaku usaha tertentu. Ketiga, surplus perdagangan barang dapat tetap terjadi meskipun rumah tangga domestik menghadapi inflasi, upah riil stagnan, atau peluang kerja berkualitas yang terbatas. Karena itu, surplus perdagangan harus dibaca sebagai indikator kekuatan eksternal, bukan sebagai bukti otomatis bahwa tekanan domestik telah reda. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Potret ekonomi Indonesia: kuat di agregat, belum tentu lega di bawah

Untuk memahami paradoks ini, perlu dilihat terlebih dahulu potret ekonomi Indonesia secara lebih utuh. Dari sisi pertumbuhan, 2025 ditutup dengan capaian **5,11 persen**, lebih tinggi dibanding 2024. Dari sisi sentimen, keyakinan konsumen Februari 2026 tetap kuat, ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini **115,9** dan Indeks Ekspektasi Konsumen **134,4**. Dari sisi konsumsi, penjualan eceran Februari 2026 diperkirakan meningkat **6,9 persen** secara tahunan dan **4,4 persen** secara bulanan karena dorongan Ramadan dan persiapan Idulfitri. Dari sisi fiskal, APBN hingga 28 Februari 2026 juga masih menunjukkan penerimaan negara **Rp358,0 triliun** dan belanja negara **Rp493,8 triliun**, dengan pertumbuhan penerimaan pajak dan belanja yang kuat. Semua ini menunjukkan bahwa fondasi makro Indonesia pada awal 2026 relatif tangguh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, indikator domestik yang lebih dekat dengan kehidupan rumah tangga menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Inflasi tahunan

Februari 2026 naik ke **4,76 persen**, sebelum turun menjadi **3,48 persen** pada Maret 2026. Kenaikan Februari antara lain dipengaruhi normalisasi tarif listrik dan inflasi emas, sementara inflasi inti Februari tercatat **2,63 persen**. Walaupun inflasi Maret menurun, fakta bahwa inflasi sempat naik cukup tinggi tetap relevan karena rumah tangga mengalami tekanan biaya hidup secara aktual, bukan secara rata-rata tahunan semata. Ketika harga kebutuhan harian bergerak cepat, rasa tertekan di level domestik bisa tetap muncul meskipun indikator makro terlihat cukup sehat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pasar kerja juga memperlihatkan ambivalensi yang sama. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka November 2025 sebesar **4,74 persen**, turun dari Agustus 2025, dan jumlah penduduk bekerja mencapai **147,91 juta orang**. Tetapi rata-rata upah buruh baru berada pada sekitar **Rp3,33 juta**. Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan Indonesia bukan hanya ketersediaan pekerjaan, tetapi juga kualitas pendapatan dari pekerjaan tersebut. Sebuah ekonomi bisa menciptakan kerja dan tetap tumbuh, tetapi bila upah riil dan stabilitas pekerjaan tidak meningkat cukup cepat, tekanan domestik akan tetap terasa. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Mengapa surplus perdagangan tidak otomatis menjadi kenyamanan domestik?

1. Karena surplus lebih banyak hidup di level agregat daripada di tingkat rumah tangga

Kinerja perdagangan luar negeri pada dasarnya berbicara tentang hubungan Indonesia dengan pasar dunia, bukan langsung tentang kondisi kas rumah tangga. Ketika BPS melaporkan surplus perdagangan, angka itu mencerminkan bahwa nilai ekspor lebih tinggi daripada impor. Tetapi rumah tangga tidak menerima "surplus" itu secara langsung dalam bentuk uang tunai. Agar surplus berdampak ke domestik, ia harus lebih dulu diterjemahkan menjadi peningkatan produksi bernilai tambah, kesempatan kerja, pendapatan tenaga kerja, dan penerimaan negara yang kemudian diubah menjadi layanan publik atau perlindungan sosial. Jika salah satu

mata rantai ini lemah, maka surplus akan berhenti sebagai prestasi makro tanpa banyak mengubah pengalaman hidup mikro. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam konteks Indonesia, tantangan transmisi itu nyata. Bank Dunia dalam *Indonesia Country Growth and Jobs Report* menegaskan bahwa walaupun Indonesia telah menikmati pertumbuhan kuat dan investasi tinggi selama bertahun-tahun, sekitar **70 persen** investasi masih mengalir ke sektor bernilai lebih rendah. Laporan yang sama menilai bahwa hal ini memperlambat perpindahan pekerja dari pekerjaan berupah rendah dan informal ke pekerjaan menengah-tinggi yang lebih produktif. Dengan kata lain, perekonomian memang tumbuh dan menghasilkan ekspor, tetapi struktur pertumbuhan itu belum cukup kuat menciptakan manfaat yang luas dan berkualitas bagi rumah tangga.

2. Karena surplus nonmigas dibayangi defisit migas

Kedua, surplus perdagangan Indonesia tidak seragam di semua komponen. BPS menegaskan bahwa surplus Januari 2026 ditopang oleh surplus nonmigas **US\$3,22 miliar**, tetapi sektor migas justru mencatat defisit **US\$2,27 miliar**. Untuk Januari–Februari 2026, surplus nonmigas mencapai **US\$5,42 miliar**, sedangkan defisit migas **US\$3,19 miliar**. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa sebagian kekuatan eksternal Indonesia masih harus dibayar mahal lewat impor energi. Defisit migas berarti bahwa rumah tangga dan sektor usaha tetap menanggung biaya ekonomi dari ketergantungan energi, baik secara langsung melalui harga maupun secara tidak langsung melalui tekanan terhadap fiskal dan kurs. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Artinya, sekalipun total perdagangan masih surplus, ekonomi domestik tidak bebas dari tekanan biaya. Ketika energi dan migas tetap defisit, keunggulan di satu sisi dikompensasikan oleh kerentanan di sisi lain. Dalam situasi global yang masih volatil, tekanan harga minyak atau pelemahan nilai tukar dapat memperbesar biaya domestik meski neraca perdagangan total tetap positif. Itulah sebabnya surplus perdagangan tidak otomatis

dirasakan sebagai “ekonomi yang ringan” oleh rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

3. Karena pertumbuhan ekspor belum cukup menghasilkan good jobs

Penjelasan ketiga terletak pada struktur pasar kerja. Bank Dunia menulis bahwa Indonesia masih menghadapi masalah khas negara berpendapatan menengah: pertumbuhan melambat di sekitar **5 persen**, padahal diperlukan pertumbuhan di atas **6 persen** untuk menuju status negara berpendapatan tinggi pada 2045, dan yang lebih penting, pertumbuhan itu belum cukup menghasilkan pekerjaan menengah-tinggi yang memperluas kelas menengah. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa porsi pekerjaan kelas menengah turun dari **14 persen pada 2019 menjadi 8,4 persen pada 2023**. Selain itu, sekitar **60 persen** pekerja masih berada di sektor informal, dan sekitar **70 persen** pekerja berada pada sektor yang menghasilkan kurang dari Rp8 juta per pekerja per bulan.

Temuan ini menjelaskan mengapa surplus perdagangan tidak serta-merta diterjemahkan menjadi kenyamanan domestik. Bila pertumbuhan ekspor dan investasi tidak menciptakan cukup banyak pekerjaan bernilai tambah tinggi, maka manfaat pertumbuhan akan lebih banyak berhenti pada laba perusahaan, penerimaan negara, atau agregat output, sementara pendapatan tenaga kerja meningkat lebih lambat. Rumah tangga lalu tetap merasakan tekanan karena kualitas kerja, keamanan kerja, dan ruang naik kelas belum cukup kuat. Dalam bahasa lain, surplus perdagangan bisa membuat neraca eksternal lebih sehat, tetapi belum tentu mempertebal dompet pekerja secara luas.

Bank Dunia juga menegaskan bahwa porsi pekerja pada pekerjaan berketerampilan tinggi hanya naik dari **7,6 persen pada 2014 menjadi 8,8 persen pada 2023**. Di saat yang sama, produktivitas manufaktur diperkirakan turun **20–30 persen** dibanding awal 1990-an. Ini berarti bahwa struktur ekonomi Indonesia memang belum cukup mendorong transformasi menuju basis produksi dan jasa yang lebih bernilai tinggi.

Karena itu, sekalipun sektor eksternal membantu pertumbuhan, penciptaan pendapatan domestik yang berkualitas tetap tertahan.

4. Karena upah riil dan daya beli masih tertekan

Penjelasan keempat adalah soal daya beli. BPS mencatat rata-rata upah buruh pada November 2025 sebesar **Rp3,33 juta**. Dalam waktu yang sama, inflasi tahunan Februari 2026 sempat mencapai **4,76 persen**. Walaupun inflasi Maret turun menjadi **3,48 persen**, tekanan biaya hidup tidak langsung hilang karena rumah tangga berhadapan dengan harga aktual untuk makanan, listrik, transportasi, dan kebutuhan rutin lain. Bila kenaikan pendapatan nominal tidak cukup cepat atau tidak merata, maka tekanan domestik akan tetap terasa walaupun perdagangan luar negeri membukukan surplus. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Perlu ditekankan bahwa rumah tangga tidak hidup dari indikator perdagangan. Mereka hidup dari arus kas bulanan. Mereka bisa tinggal dalam negara yang surplus dagang, tetapi tetap merasa sempit karena pengeluaran rutin terus menyerap sebagian besar pendapatan. Di sinilah perbedaan antara keberhasilan makro dan kenyamanan mikro menjadi sangat tajam. Surplus perdagangan memperbaiki neraca eksternal negara, sedangkan tekanan biaya hidup mengukur kapasitas bertahan rumah tangga. Kedua hal ini bisa bergerak ke arah yang berbeda. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5. Karena manfaat pertumbuhan masih tidak merata secara spasial dan sosial

Tekanan domestik juga bertahan karena distribusi manfaat pertumbuhan masih belum merata. BPS melaporkan bahwa persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi **8,25 persen**, tetapi angka kemiskinan perdesaan tetap **10,72 persen**, jauh di atas perkotaan yang **6,60 persen**. Di sisi lain, gini ratio nasional memang turun ke **0,363**, tetapi gini ratio perkotaan masih **0,383**, lebih tinggi dibanding perdesaan **0,295**. Data ini

menunjukkan bahwa keberhasilan makro belum menghapus kerentanan spasial dan sosial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketika pertumbuhan dan surplus perdagangan lebih banyak terpusat pada wilayah, sektor, dan kelompok tertentu, maka rumah tangga di wilayah lain tidak otomatis merasakan manfaat proporsional. Sebuah kota industri, pelabuhan ekspor, atau kawasan pertambangan mungkin menikmati limpahan lebih besar daripada wilayah perdesaan yang mengandalkan pertanian skala kecil atau perdagangan lokal. Karena itu, tekanan domestik dapat tetap terasa secara luas walaupun agregat nasional terlihat kuat. Yang membaik adalah rata-rata, tetapi yang dialami masyarakat adalah distribusinya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Mengapa sentimen konsumen dan penjualan eceran yang kuat belum membantah adanya tekanan?

Seseorang mungkin bertanya: jika tekanan domestik memang kuat, mengapa keyakinan konsumen tetap tinggi dan penjualan eceran masih meningkat? Jawabannya adalah karena resiliensi konsumsi tidak sama dengan kenyamanan ekonomi. Survei Konsumen BI Februari 2026 memang menunjukkan IKK **125,2**, yang berarti optimistis. Survei Penjualan Eceran juga menunjukkan bahwa penjualan Februari diperkirakan tumbuh **6,9 persen** secara tahunan dan **4,4 persen** secara bulanan, terutama didorong oleh Ramadan dan persiapan Idulfitri. Tetapi angka-angka ini lebih tepat dibaca sebagai bukti bahwa masyarakat masih berusaha mempertahankan konsumsi, bukan bukti bahwa tekanan telah hilang. ([Bank Indonesia](#))

Dalam banyak kasus, rumah tangga Indonesia bertahan dengan berbagai strategi penyesuaian: mengurangi pos belanja tertentu, menunda pembelian barang tahan lama, menambah jam kerja, mengandalkan pekerjaan sampingan, atau mengurangi tabungan. Konsumsi tetap bergerak karena kebutuhan sosial, budaya, dan keagamaan juga berjalan. Maka, penjualan eceran yang baik tidak selalu identik dengan ruang fiskal rumah tangga yang longgar. Ia bisa juga mencerminkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggi di tengah tekanan. ([Bank Indonesia](#))

Ilustrasi naratif: surplus di laporan, sempit di dapur rumah tangga

Bayangkan seorang pekerja formal di kota menengah yang memperoleh gaji sekitar rata-rata upah buruh nasional. Pasangannya menjalankan usaha kecil berbasis pesanan. Secara statistik, keluarga ini tinggal di negara yang mencatat pertumbuhan 5,11 persen, neraca dagang surplus, dan penjualan eceran yang meningkat. Namun dalam kehidupan nyata mereka melihat harga pangan berfluktuasi, biaya listrik dan transportasi tidak selalu ringan, margin usaha kecil tertekan, dan kebutuhan anak sekolah terus bertambah. Mereka mungkin masih berbelanja menjelang Ramadan, tetapi harus menahan pembelian barang lain. Mereka mungkin tidak jatuh miskin, tetapi jelas belum merasa lega. Kondisi semacam inilah yang menjelaskan mengapa surplus perdagangan tidak otomatis terasa sebagai kesejahteraan domestik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Narasi yang sama juga berlaku pada pelaku UMKM atau petani kecil. Jika surplus perdagangan lebih banyak ditopang oleh sektor tertentu, sedangkan biaya input, transportasi, atau konsumsi rumah tangga tetap tinggi, maka manfaat surplus tidak masuk secara proporsional ke kehidupan mereka. Mereka hidup di dalam ekonomi yang secara eksternal tampak kuat, tetapi secara domestik tetap penuh kehati-hatian. Paradoks inilah yang sering membuat publik merasa bahwa "angka makro bagus, tetapi hidup tetap berat." ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi kebijakan

1. Surplus perdagangan harus diubah menjadi strategi nilai tambah domestik

Implikasi pertama adalah bahwa surplus perdagangan tidak boleh berhenti sebagai capaian statistik. Ia harus diterjemahkan menjadi industrialisasi bernilai tambah, penguatan manufaktur dan jasa modern, serta pengurangan ketergantungan pada sektor bernilai rendah. Temuan Bank Dunia bahwa sekitar **70 persen** investasi masih mengalir ke sektor bernilai rendah adalah peringatan bahwa Indonesia membutuhkan transformasi

yang lebih dalam. Tanpa itu, surplus hanya memperkuat neraca eksternal tanpa banyak memperbaiki kualitas pekerjaan domestik.

2. Ketahanan energi tetap menjadi agenda domestik utama

Kedua, defisit migas harus dilihat sebagai sumber tekanan domestik yang kronis. Selama sektor migas masih defisit besar, setiap surplus nonmigas akan sebagian dikikis oleh kebutuhan energi. Karena itu, agenda efisiensi energi, diversifikasi energi, dan pengurangan ketergantungan impor energi bukan hanya agenda lingkungan atau geopolitik, tetapi juga agenda kesejahteraan domestik. Tekanan biaya hidup akan lebih sulit reda bila struktur energi tetap rentan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

3. Fokus kebijakan harus bergeser dari job creation ke good jobs creation

Ketiga, Indonesia perlu memperbaiki kualitas pertumbuhan pasar kerja. Data BPS menunjukkan pengangguran terbuka relatif rendah, tetapi Bank Dunia memperlihatkan bahwa porsi pekerjaan kelas menengah justru menurun dan pekerjaan berketerampilan tinggi bertambah sangat lambat. Maka, ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup lagi hanya menambah jumlah kerja; ia harus beralih pada penciptaan kerja yang lebih aman, lebih produktif, dan lebih baik upahnya. Tanpa itu, surplus perdagangan dan pertumbuhan PDB akan terus gagal menjadi rasa aman ekonomi bagi rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

4. Inflasi dan biaya hidup harus dilihat sebagai masalah distribusi, bukan sekadar angka makro

Keempat, tekanan domestik hanya bisa dikurangi bila biaya hidup terkendali. Naiknya inflasi Februari 2026 menjadi **4,76 persen** menunjukkan bahwa rumah tangga tetap rentan terhadap kenaikan harga, terutama pada kebutuhan pokok. Meskipun inflasi Maret menurun, kebijakan tetap perlu fokus pada pangan, distribusi, energi, dan komponen biaya hidup yang paling dekat dengan konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan tanpa stabilitas biaya hidup akan selalu terasa timpang secara sosial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5. Pemerataan spasial perlu diperlakukan sebagai agenda inti, bukan pelengkap

Kelima, distribusi wilayah harus diperhatikan lebih serius. Selama kemiskinan perdesaan tetap jauh lebih tinggi dan ketimpangan kota masih relatif lebar, manfaat surplus perdagangan tidak akan terasa merata. Infrastruktur, konektivitas logistik, pendidikan, dan akses pasar di luar pusat pertumbuhan perlu dilihat sebagai syarat agar keberhasilan makro benar-benar menyebar ke bawah. Dengan kata lain, pemerataan bukan lawan dari pertumbuhan, tetapi prasyarat agar pertumbuhan dibaca masyarakat sebagai keberhasilan yang nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kesimpulan

Makalah ini menunjukkan bahwa paradoks “surplus perdagangan tetapi tekanan domestik masih terasa” sangat masuk akal dalam konteks Indonesia awal 2026. Surplus perdagangan Januari 2026 sebesar **US\$0,95 miliar** dan surplus Januari–Februari 2026 sebesar **US\$2,23 miliar** memang menandakan bahwa posisi eksternal Indonesia masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar **5,11 persen**, keyakinan konsumen yang tetap optimistis, penjualan eceran yang meningkat, dan APBN yang masih bergerak juga memperkuat gambaran bahwa Indonesia tidak sedang berada dalam krisis makro. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, keberhasilan itu tidak otomatis menjadi kenyamanan domestik. Tekanan tetap terasa karena surplus perdagangan bersifat agregat dan terkonsentrasi, defisit migas masih membebani, pasar kerja belum cukup menghasilkan **good jobs**, rata-rata upah masih terbatas, inflasi biaya hidup tetap menekan, dan distribusi manfaat pertumbuhan belum merata. Temuan Bank Dunia tentang menyusutnya pekerjaan kelas menengah dan stagnannya pekerjaan berketerampilan tinggi memberi dasar kuat bagi kesimpulan ini. Rumah tangga tidak hidup dari surplus perdagangan;

mereka hidup dari pendapatan riil, harga kebutuhan pokok, kestabilan pekerjaan, dan peluang naik kelas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan judul makalah ini adalah: **karena surplus perdagangan memperbaiki posisi eksternal negara, tetapi tidak otomatis memperbaiki struktur domestik yang menentukan kesejahteraan sehari-hari.** Surplus adalah bantalan penting, tetapi bukan obat mujarab. Ia baru akan sungguh-sungguh terasa di dalam negeri bila diubah menjadi produktivitas lebih tinggi, pekerjaan lebih baik, energi yang lebih efisien, harga hidup yang lebih terkendali, dan distribusi peluang yang lebih merata. Selama mata rantai itu belum kuat, maka laporan perdagangan boleh saja surplus, tetapi tekanan ekonomi domestik akan tetap terasa. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Surplus perdagangan

Kondisi ketika nilai ekspor barang lebih besar daripada nilai impor barang dalam periode tertentu. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Surplus nonmigas

Selisih positif antara ekspor dan impor barang nonmigas; pada Indonesia awal 2026, surplus total terutama ditopang komponen ini. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Defisit migas

Kondisi ketika impor minyak dan gas melebihi ekspor migas, sehingga menjadi beban pada neraca perdagangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Good jobs

Pekerjaan yang bukan hanya tersedia, tetapi juga relatif stabil, produktif, terlindungi, dan memberikan pendapatan yang cukup untuk mobilitas sosial.

Upah riil

Nilai pendapatan setelah memperhitungkan perubahan harga atau inflasi; ini lebih mencerminkan daya beli daripada pendapatan nominal semata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indikator persepsi rumah tangga terhadap kondisi ekonomi sekarang dan masa depan. ([Bank Indonesia](#))

Gini ratio

Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan; semakin tinggi nilainya, semakin timpang distribusinya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Volatile food

Kelompok komoditas pangan yang harganya mudah berfluktuasi akibat musim, pasokan, dan distribusi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kelas menengah pekerjaan

Kelompok pekerjaan yang memberi tingkat pendapatan cukup untuk menopang gaya hidup kelas menengah dan mobilitas sosial yang lebih baik.

Transformasi struktural

Perubahan komposisi ekonomi dari sektor bernilai rendah ke sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Ekspor dan impor Indonesia Januari 2026 masing-masing tercatat USD 22,16 miliar dan USD 21,20 miliar*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026c). *Ekspor dan impor Indonesia Februari 2026 masing-masing tercatat USD 22,17 miliar dan USD 20,89 miliar*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026d). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026e). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026f). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026g). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026h). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026a). *Survei Konsumen Februari 2026: Keyakinan konsumen tetap kuat*. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026b). *Survei Penjualan Eceran Februari 2026: Penjualan eceran diperkirakan meningkat*. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Surplus Perdagangan, tetapi Mengapa Tekanan
Ekonomi Domestik Masih Terasa*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *APBN Kita Februari 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (media.kemenkeu.go.id)

World Bank. (2026). *Indonesia Country Growth and Jobs Report: Running faster, for longer*. World Bank. ([World Bank](https://www.worldbank.org))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 1 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/69ccaabe-5698-839f-b0a3-4c1460747946))

<https://chatgpt.com/c/69ccaabe-5698-839f-b0a3-4c1460747946>